

ABSTRAKSI

Pengembangan masyarakat bukan suatu hal yang baru. Sejak Negara kita mencapai kemerdekaan, istilah pembangunan mendapat tempat yang sangat besar dalam pembentukan Negara bangsa. Pada saat dinamika pembangunan demikian rancak pada masa Orde Baru, pengembangan masyarakat mengambil posisi dan kontribusi penting. Meskipun demikian, pemberdayaan masyarakat kurang mendapat perhatian karena kendali pembangunan banyak berasal dari pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan (top down).

Setelah Orde Baru berakhir dan Era Reformasi dimulai, dimana kebebasan dan hak asasi manusia (HAM) menjadi unsur primadona, seetidaknya dalam wacana pembangunan, tema-tema, seperti pemberdayaan, penguatan kapasitas, kelembagaan lokal, kearifan lokal, modal sosial, dan inisiatif local terus bergema dan mewarnai diskusi akademik mengenai pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Kemiskinan di perkotaan, termasuk di Kota Surabaya adalah salah satu masalah sosial yang hingga kini tetap sulit terpecahkan, dan bahkan nyaris mustahil dapat diselesaikan hanya dalam hitungan satu-dua atau bahkan lima tahun anggaran. Sebagai kota yang tumbuh menjadi mega-urban, terbukti perkembangan kota Surabaya yang hiper aktif itu ternyata tidak selalu paralel dengan peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan kendati sering di dengung-dengungkan bahwa program pembangunan kota yang dilaksanakan senantiasa bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidak merataan, namun akibatnya justru menyebabkan putusnya ikatan masyarakat yang lemah dan bahkan substansi dari berbagai kebijakan pemerintah kota cenderung memusuhi golongan masyarakat miskin di kota¹.

¹ Andreal Bayo. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Tahun 1981. Yogyakarta: Liberty. Hal. 50